



Pemerintah Kabupaten Katingan
Badan Pendapatan Daerah

Nomor SOP	: 900.1.3.2 / 1 Bapenda -4 / VII / 2024
Tanggal Pembuatan	: 26 JULI 2024
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah YODIHEL, SE.,M.Si NIP. 19710124 199703 1 006
Nama SOP	: Pengawasan Transaksi Pembayaran PBB-P2 Secara Online

Sub Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi

Dasar Hukum

1. Undang Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Keterkaitan SOP

1. SOP Pendaftaran Pajak Daerah
2. SOP Pendataan Pajak Daerah
3. SOP Penetapan Pajak Daerah
4. SOP Pengajuan Keberatan Pajak Daerah

Peringatan

Jika prosedur pengawasan transaksi PBB-P2 secara online tidak dilaksanakan maka transaksi pembayaran PBB-P2 secara online tidak terawasi sehingga berakibat terjadinya kesalahan transaksi pembayaran pajak daerah

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami prosedur pengawasan
2. Menguasai pengoperasian komputer
3. Memahami tugas dan fungsi

Peralatan/ Perlengkapan

1. Website PBB-P2
2. Jaringan Internet
3. Komputer
4. Printer

Pencatatan & Pendataan

1. NOP PBB
2. Transaksi Pembayaran
3. Rekening Koran



No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Bidang Pelayanan, Sistem Informasi, Pembukuan dan Pelaporan	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi	Channel Pembayaran	Bendahara Penerima	Tim Pengelola Website	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memonitoring transaksi Pelunasan Pembayaran PBB-P2 melalui website.						Data transaksi Pelunasan Pembayaran PBB-P2	5 menit	Data Pelunasan	
2	Koodinasi data pelunasan disandingkan dengan data transaksi penerimaan PBB, antara Tim Pengelola website dengan Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah						Data Pelunasan dan Rekening Koran	5 menit	Laporan Pelunasan	
3	Bendahara Penerima dan Tim Pengelola website melakukan pencocokan data antara data transaksi Pelunasan Pembayaran PBB-P2 hasil monitoring dengan data Penerimaan PBB, jika sesuai dengan nilai transaksi yang masuk ke RKUD Kab. Katingan maka transaksi sudah sesuai. Tetapi jika tidak sesuai antara data transaksi Pelunasan Pembayaran PBB-P2 hasil monitoring dengan data Penerimaan PBB yang masuk ke RKUD Kab. Katingan maka dilakukan pengecekan ke chanel pembayaran.						Data Pelunasan dan Rekening Koran	15 menit	Laporan Pelunasan	
4	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi menerima laporan hasil monitoring transaksi pembayaran PBB-P2						Laporan Pelunasan	3 menit	Laporan Pelunasan	
5	Kepala Bidang Pelayanan, Sistem Informasi, Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan hasil monitoring transaksi pembayaran PBB-P2.						Laporan Pelunasan	2 menit	Laporan Pelunasan	

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Katingan

YODHEL SE./M.Si
NIP. 19710124 199703 1 006